

PENGARUH KAPITALISASI DIGITAL DAN EKONOMI PLATFORM TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA

Choirunnisa¹, Deska Fitriana², Salma Nur Aliya³, Azizah Juwita Nia Arif⁴, Cut Misni Mulasowi⁵, Lina Rifda Naufalin⁶

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Email corresponding author: chorunnisa@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Perkembangan kapitalisme digital yang ditandai oleh dominasi platform teknologi dan pemanfaatan data besar (big data) telah membawa transformasi mendalam terhadap struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Meningkatnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia kerja mendorong terciptanya model bisnis baru berbasis platform, seperti e-commerce, fintech, layanan ride-hailing, dan ekonomi gig. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana kapitalisme digital mempengaruhi pasar tenaga kerja di Indonesia, baik dari sisi peluang maupun tantangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap berbagai sumber literatur ilmiah, data statistik resmi, serta dokumen kebijakan nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital membuka peluang kerja baru yang fleksibel dan berbasis teknologi, namun juga memperbesar risiko ketidakpastian kerja, ketimpangan keterampilan digital, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja informal dan platform. Selain itu, kapitalisme digital juga cenderung memusatkan kontrol ekonomi pada segelintir aktor teknologi global, sehingga memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif dan berpihak pada kesejahteraan pekerja agar transformasi digital dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kapitalisme digital, tenaga kerja, ekonomi platform, transformasi digital, kebijakan ketenagakerjaan

Abstract

The development of digital capitalism, characterized by the dominance of technology platforms and the exploitation of big data, has significantly transformed the structure of the labor market in Indonesia. The increasing adoption of information and communication technologies in the world of work has fostered the emergence of new platform-based business models, such as e-commerce, fintech, ride-hailing services, and the gig economy. This study aims to systematically analyze how digital capitalism affects the labor market in Indonesia, focusing on both opportunities and challenges. Using a Systematic Literature Review (SLR) method, the study reviews scholarly articles, official statistical data, and national and international policy documents. The findings indicate that digital transformation creates new, flexible, and technology-based job opportunities. However, it also intensifies job insecurity, digital skill gaps, and weak legal protections for informal and platform workers. Moreover, digital capitalism tends to concentrate economic power in the hands of a few global tech actors, thereby widening socio-economic inequality. Consequently, adaptive public policies that prioritize workers' welfare are urgently needed to ensure an inclusive, equitable, and sustainable digital transformation.

Keywords: digital capitalism, labor, platform economy, digital transformation, labor policy

PENDAHULUAN

Saat ini ekonomi digital muncul sebagai manifestasi global yang ditunjukan melalui perubahan diberbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Kemajuan yang sangat cepat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya Perubahan tersebut mencakup pola kerja yang semakin fleksibel, munculnya jenis-jenis pekerjaan baru, hingga meningkatnya tuntutan terhadap keterampilan digital agar tenaga kerja mampu beradaptasi dan bersaing dalam pasar kerja yang semakin terdigitalisasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), penggunaan platform digital seperti *e-commerce*, *ride-hailing*, dan layanan keuangan digital terus meningkat. Kondisi ini mendorong pertumbuhan sektor teknologi dan jasa digital, namun di sisi lain juga menyebabkan disrupti terhadap sektor-sektor tradisional yang mulai tergeser oleh otomatisasi dan efisiensi berbasis teknologi (Abdillah, 2024). Transformasi ini mencerminkan pergeseran nilai tambah dari tenaga kerja konvensional menuju teknologi berbasis data dan sistem digital (World Bank, 2021).

Kemajuan teknologi telah mendorong berbagai industri untuk menciptakan produk dan layanan berbasis digital seperti *e-commerce*, fintech, dan platform jasa on-demand. Respons ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar digital yang terus berkembang, tetapi juga sebagai strategi untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan global. Menurut laporan Google, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara (Temasek & Bain, 2022).

Peralihan pada ekonomi digital menghasilkan prospek baru bagi angkatan kerja Indonesia, termasuk pembentukan lapangan kerja, peningkatan fleksibilitas kerja, dan aksesibilitas pasar yang lebih luas. Namun, muncul pula tantangan besar, seperti ketidakpastian kerja, kesenjangan keterampilan digital, serta minimnya perlindungan dan regulasi bagi pekerja di sektor *gig economy* dan platformisasi. Fenomena kapitalisme digital yakni dominasi ekonomi oleh segelintir perusahaan platform besar menjadikan akses terhadap sumber daya digital dan peluang ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja (Firmansyah & Poppy Sulistyaning Winanti, 2023). Hal ini memperbesar potensi ketimpangan ekonomi dan sosial di kalangan pekerja Indonesia. Sehingga timbul potensi ancaman terhadap rasa keadilan dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia, yang sejatinya layak mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang setara.

Peran ekonomi digital sebagai salah satu komponen utama dalam pembangunan nasional semakin menonjol, seiring kontribusinya yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memberikan peluang baru bagi sektor industri dan UKM, tetapi juga mengubah struktur ketenagakerjaan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kajian terhadap perkembangan ekonomi digital serta dampaknya terhadap sistem ekonomi nasional menjadi sangat relevan. Digitalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari proses bisnis perusahaan, perilaku konsumsi masyarakat, hingga evolusi pasar tenaga kerja yang kini semakin berbasis teknologi. Dalam konteks pembangunan regional dan nasional, aspek ketenagakerjaan tetap menjadi elemen esensial dalam menopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi. (Ricana AjiGantha, 2022)

Dalam kerangka pembangunan ekonomi, tenaga kerja tetap menjadi pilar utama, baik sebagai pelaku produksi maupun konsumen. Situasi ini menuntut regulasi ketenagakerjaan yang tidak hanya adaptif terhadap dinamika teknologi, tetapi juga menjamin hak-hak dasar pekerja. Sebagaimana dinyatakan dalam (Hidayat & Ulfatun Najicha, 2021), berbagai konflik ketenagakerjaan seperti masalah upah, penempatan kerja, hingga keselamatan dan kesehatan kerja masih menjadi isu yang memerlukan penanganan serius. Oleh karena itu, regulasi yang dirancang secara sistematis diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan mendorong terciptanya iklim kerja yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selanjutnya, laporan International Labour Organization (ILO, 2022) menegaskan bahwa pekerjaan berbasis platform tanpa kebijakan yang tepat berisiko memperlemah kondisi kerja yang layak, terutama bagi pekerja informal, pekerja perempuan, dan tenaga kerja muda. Transformasi digital yang tidak diiringi kebijakan perlindungan akan memperbesar kesenjangan struktural dalam pasar tenaga kerja nasional.

Kondisi ini mendorong perlunya telaah yang mendalam terhadap pengaruh ekonomi platform, baik dari sisi peluang maupun tantangan yang ditimbulkannya bagi tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kapitalisme digital mempengaruhi struktur pasar kerja nasional, menggali peluang serta ancaman yang ada, serta menyoroti pentingnya kebijakan yang responsif dan adaptif agar manfaat dari perkembangan ekonomi digital dapat dinikmati secara merata dan adil oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam mendorong kebijakan publik yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika transformasi digital.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kapitalisme Digital

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang paling berpengaruh dalam tatanan dunia saat ini. Sejak pertama kali muncul setelah runtuhnya sistem feudalisme, kapitalisme mengalami perkembangan pesat dan menjadi landasan utama bagi banyak negara, baik yang sudah maju maupun yang masih berkembang. Secara umum, kapitalisme dipahami sebagai sistem yang menekankan kebebasan individu dalam mengelola serta memiliki aset ekonomi, dan peran pasar bebas yang mengatur aktivitas ekonomi. Sistem ini berpijak pada prinsip kepemilikan pribadi, di mana individu atau perusahaan memiliki wewenang untuk memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk maupun layanan demi memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, mekanisme pasar dan persaingan antar pelaku ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan harga serta jumlah barang yang beredar. (Hanifah, 2024)

Kapitalisme digital adalah suatu sistem ekonomi modern yang tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi digital, di mana aktivitas bisnis memanfaatkan platform media sosial untuk mengumpulkan dan mengolah data serta konten dari pengguna sebagai sumber daya yang bernilai komersial. (Rico & Rosadi, 2023)

Penggunaan informasi digital oleh perusahaan telah menjadi instrumen strategis untuk memaksimalkan pendapatan. Dalam konteks pemasaran, kecanggihan teknologi memungkinkan penetapan target pasar secara otomatis melalui data yang dihasilkan oleh aktivitas daring konsumen (Fuchs, 2016). Konsekuensinya, tatanan dominasi pasar mengalami pergeseran otoritas tidak lagi dimonopoli oleh pelaku bermodal besar atau berintensitas tenaga kerja tinggi, tetapi oleh organisasi jasa yang mengelola dan merekayasa aliran informasi demi tujuan ekonomi, sosial, maupun politik (Fuchs, 2017).

Dalam kapitalisme digital, media sosial memegang peran penting dalam mengumpulkan data pribadi pengguna, menampilkan iklan terpersonalisasi, serta mengeksplorasi informasi pengguna demi kepentingan ekonomi perusahaan. Hal ini menimbulkan permasalahan seperti pelanggaran privasi, ketimpangan akses digital, dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada perusahaan platform raksasa (Zuboff, 2019).

Ekonomi Platform

Ekonomi digital timbul melalui proses transformasi digital yang tidak dapat terhitung, beragam, tersebar. Terdiri dari perubahan cara konsumen, karyawan, pasar, perusahaan, dan fungsi organisasi lainnya. Ekonomi digital diperbolehkan untuk mengembangkan dan meluncurkan teknologi terobosan (baru) untuk memproduksi, mengumpulkan, memproses, menganalisis dan menggunakan data, seperti



perangkat digital seluler yang terhubung, *Internet of Things*, komputasi awan, dan di atas semua itu terdapat algoritma kecerdasan buatan/*Artificial Intellegent* (AI). (Maglearning, 2022)

Menurut (Budiarta et al., 2020), ekonomi digital dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis atau usaha yang memanfaatkan internet serta menggunakan teknologi informasi secara intensif. Hal ini mencakup penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan aplikasi yang mendukung telekomunikasi dalam berbagai aspek sistem ekonomi, seperti pengadaan, penjualan, distribusi barang dan jasa, serta transaksi keuangan. Ekonomi digital memiliki tiga karakter utama dalam pelaksanaannya, yaitu mobilitas, pemanfaatan data, dan efek jaringan.

Platform ekonomi digital adalah sekumpulan teknologi berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang menyediakan tempat bagi para pengguna untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam mendukung produktivitas kerja maupun kegiatan bisnis, platform digital harus memenuhi beberapa persyaratan penting, yakni kemudahan akses, kenyamanan pengguna, dan perlindungan keamanan data. (Perdiyanti & Faeni, 2021)

Platform adalah model bisnis baru yang memakai teknologi untuk menghubungkan orang, organisasi, dan sumber daya dalam komunitas yang interaktif, dimana sejumlah nilai dipertukarkan dan dibuat. Sedangkan ekonomi platform merupakan jenis platform yang mempermudah pengguna untuk berbagi atau menyewakan aset seperti rumah, mobil, atau peralatan. (Putri, 2023)

Ekonomi Platform berfokus pada bisnis yang bertindak sebagai platform. Ide bisnis utamanya adalah untuk menyambungkan dua atau lebih kelompok pengguna (pasar dua sisi atau multisisi). Ekonomi platform berkaitan juga dengan ekonomi jaringan, karena efek jaringan juga menjadi pendorong penting untuk bisnis platform. Namun, tidak semua ekonomi jaringan adalah ekonomi platform atau sebaliknya. (Maglearning, 2022)

Berikut beberapa contoh platform ekonomi yang sering digunakan di Indonesia:

- a. E-commerce: Platform yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara online. Contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada.
- b. Dompet Digital (E-Wallet): Aplikasi pembayaran digital sebagai pengganti transaksi tunai. Contohnya Dana, OVO, LinkAja, GoPay.
- c. Ride-Hailing: Menyediakan layanan transportasi dan juga pengantaran makanan, barang, dan belanjaan.
- d. Content Creator: Menjadi sarana untuk menghasilkan uang melalui konten digital, endorsement, dan monetisasi. Contohnya YouTube, TikTok, dan Instagram.
- e. Platform Freelance dan Remote Work: Memfasilitasi tenaga kerja lepas yang mengandalkan koneksi internet untuk bekerja dengan klien global.

Ekonomi platform memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan ketenagakerjaan karena model ini menciptakan fleksibilitas, efisiensi biaya, serta membuka akses pasar global. Namun demikian, tantangan besar juga muncul, seperti eksloitasi tenaga kerja, kurangnya perlindungan sosial, dan hubungan kerja yang tidak formal (ILO, 2022).

Tenaga Kerja

Perkembangan ekonomi digital memberikan pengaruh besar terhadap dunia ketenagakerjaan, baik dalam membuka lapangan kerja baru maupun menimbulkan tantangan seperti hilangnya beberapa jenis pekerjaan akibat otomatisasi dan digitalisasi. Masfiatur et al. (2023) menyatakan bahwa digitalisasi telah menjadi pendorong utama berkembangnya sektor ekonomi kreatif, perusahaan rintisan, dan perdagangan daring, yang secara signifikan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga menunjukkan bahwa transformasi digital berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan dalam usia kerja, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut UU No.13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, untuk memenuhi memenuhi

kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, definisi ini meluas mencakup pekerja freelance, gig worker, remote worker, hingga konten kreator. (Wijayanto & Ode, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 tentang perencanaan tenaga kerja serta informasi ketenagakerjaan mencakup: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan, dan Kesejahteraan tenaga kerja. Isu ketenagakerjaan senantiasa menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan keluarga.

Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja (*manpower*) merupakan penduduk yang memiliki usia kerja (15 tahun keatas) yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam konteks ini, tenaga kerja dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Tenaga kerja terdidik, yaitu individu yang membutuhkan latar belakang pendidikan tinggi untuk menjalankan pekerjaannya, seperti dokter, guru, dan insinyur.
- b. Tenaga kerja terlatih, yakni mereka yang harus melalui proses pelatihan atau memiliki pengalaman khusus, seperti sopir dan montir.
- c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu pekerja yang tidak memerlukan pendidikan formal maupun pelatihan khusus, contohnya tukang sapu dan petugas kebersihan.

Aspek ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena mencakup seluruh populasi produktif yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, baik di sektor formal maupun informal. Sebagaimana diuraikan oleh (Hidayat & Ulfatun Najicha, 2021), komposisi tenaga kerja di Indonesia meliputi pekerja migran, pekerja sektor formal, serta pelaku usaha di sektor informal. Transformasi dalam sektor ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti kebijakan publik, dinamika ekonomi, serta perkembangan teknologi digital yang mempercepat perubahan di dunia kerja.

Ketimpangan digital, keterbatasan keterampilan, dan lemahnya sistem pelatihan kerja menjadi kendala utama dalam menyiapkan angkatan kerja yang kompetitif di era ekonomi digital. Menurut World Bank (2021), pekerja Indonesia masih belum siap secara struktural untuk menghadapi otomatisasi dan digitalisasi karena terbatasnya keterampilan abad 21 seperti digital literacy, problem solving, dan adaptabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai metode utama untuk menelaah berbagai sumber literatur yang relevan secara sistematis dan terstruktur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi secara kritis, dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya guna membangun pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai isu yang diteliti. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang kuat serta mendukung analisis secara objektif terhadap berbagai perspektif yang berkembang di bidang ekonomi digital dan ketenagakerjaan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur sekunder yang valid dan terpercaya. Literatur utama mencakup artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional yang membahas topik-topik seperti ekonomi platform, kapitalisme digital, tenaga kerja, serta dinamika ekonomi global. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen dan laporan resmi dari lembaga-lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna memperkuat konteks empiris serta memperluas cakupan analisis. Penelitian ini dilakukan analisis isi secara tematik terhadap literatur yang terpilih, dengan menyusun matriks sintesis berdasarkan topik, temuan utama, lokasi studi, serta keterkaitannya dengan isu ketenagakerjaan digital di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Platform Digital di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melihat kemajuan besar dalam teknologi digital. Penetrasi internet yang telah mencapai lebih dari 80% populasi, ditambah dengan perkembangan infrastruktur jaringan dan aplikasi digital, telah membuka peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi. Pemerintah melalui inisiatif nasional seperti "Making Indonesia 4.0" dan peluncuran 5G turut mempercepat proses digitalisasi, termasuk di sektor ketenagakerjaan. (Telkom, 2024)

Perubahan sosial di era masyarakat modern tidak hanya dipengaruhi oleh kapitalisme, tetapi juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta revolusi dalam teknologi informasi. Hal ini kemudian memunculkan konsep kapitalisme informasi dan masyarakat informasi, sebagaimana dikemukakan oleh Sugihartati (2014). Dengan hadirnya Revolusi Industri 4.0, terjadi transformasi pada pola perilaku, budaya, dan kebiasaan masyarakat di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Kini, teknologi digital dimanfaatkan secara luas sebagai sumber pendapatan utama bagi perusahaan dan sektor industri, di mana kapitalisasi informasi dan data menjadi elemen paling penting dan bernilai tinggi dalam era ini. (Ishaq & Saksono, 2023)

Teknologi terus berkembang mulai dari revolusi industri sampai era digitalisasi. Perkembangan tersebut membawa pengaruh yang besar di berbagai bidang dalam masyarakat, termasuk ekonomi. Kegiatan ekonomi berkembang dari cara paling tradisional hingga kini bertransformasi dengan cara digital yang sangat cepat. Salah satu faktor pendukung ekonomi digital adalah adanya platform digital. Platform digital merupakan kerangka teknologi yang dirancang untuk mendukung pengembangan berbagai fungsi komputasi. Platform ini juga memungkinkan seseorang untuk mengintegrasikan sistem teknologi informasi, perangkat komputasi, serta konektivitas yang tersedia secara terpadu.

Pertumbuhan cepat di sektor e-commerce dan teknologi keuangan (*fintech*) menjadi tanda tanda kemajuan digital, karena layanan pembayaran digital dan inovasi keuangan membuat masyarakat lebih mudah dalam bertransaksi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang teknologi digital semakin banyak dilakukan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Platform ekonomi di Indonesia saat ini sangat beragam, mencakup e-commerce, dompet digital, ride-hailing, platform freelance/remote work dan lainnya.

Kondisi tenaga kerja di Era Digital

Seiring pertumbuhan populasi Indonesia, jumlah angkatan kerjanya juga mengalami kenaikan signifikan. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 dari BPS, angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta dibandingkan Februari 2024 . Dari jumlah tersebut, sebanyak 145,77 juta orang telah terserap ke dalam dunia kerja serta ada tambahan 3,59 juta pekerja baru selama setahun terakhir. Walaupun tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit turun menjadi 4,76%, jumlah penganggur juga mengalami kenaikan, mencapai 7,28 juta orang, atau bertambah sekitar 83 ribu dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski pertumbuhan lapangan kerja cukup tinggi, penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya berhasil mengimbangi peningkatan angkatan kerja. (Suhandi et al., 2021)

Berdasarkan status pekerjaannya, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi pekerja formal dan pekerja informal. Badan Pusat Statistik (BPS) memanfaatkan status pekerjaan utama sebagai indikator untuk membedakan pekerja formal dan pekerja informal. Yang termasuk dalam kategori pekerja informal meliputi mereka yang bekerja mandiri, menjalankan usaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau buruh tanpa upah, pekerja lepas, serta anggota keluarga yang bekerja tanpa dibayar. Pekerja lepas digolongkan sebagai pekerja informal karena pada umumnya di Indonesia jenis pekerjaan ini bersifat informal, ditandai dengan tingkat produktivitas yang rendah, penghasilan yang kurang layak, serta kondisi kerja yang cenderung tidak memadai.

Penduduk berpenghasilan rendah yang hidup dalam kondisi miskin umumnya hanya mampu mengakses sektor informal dan akhirnya menjadi pekerja informal. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kemiskinan juga masih dialami oleh mereka yang telah bekerja. Individu yang berada dalam kemiskinan akan melakukan pekerjaan apa saja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Pekerjaan di sektor informal menjadi pilihan umum bagi pekerja miskin dan dijadikan cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan di kalangan pekerja informal menuntut penanganan yang menyeluruh, mencakup isu pengupahan dan kondisi kerja, penyediaan perlindungan sosial, program pelatihan dan pendidikan keterampilan, hingga upaya mendorong kesetaraan gender.

Transformasi industri 4.0 telah dimulai sejak tahun 2018, ditandai dengan adanya bermacam-macam perubahan dalam gaya hidup, cara bekerja, dan pola interaksi manusia. Salah satu ciri khasnya adalah pergeseran peran dalam proses produksi dari manusia ke teknologi otomatis seperti mesin dan robot. Dalam wawancaranya, Phillia Wibowo, Presiden Direktur PT McKinsey Indonesia, menyatakan bahwa terdapat sejumlah keterampilan penting yang harus segera dikuasai oleh para pekerja agar mereka tidak tergantikan oleh sistem otomatisasi (L.Hadi et al., 2020). Di Indonesia, diskusi publik tentang otomatisasi seringkali menyoroti ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan. Namun, pekerjaan yang hilang berpotensi digantikan dengan berbagai lapangan kerja baru sebagai dampak dari peningkatan konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Phillia menekankan perlunya Indonesia untuk mulai mempersiapkan peralihan keterampilan secara serius guna menghadapi era otomatisasi. Upaya ini mencakup penguatan pendidikan serta pelatihan vokasional guna membekali tenaga kerja dengan kemampuan yang relevan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja masa depan.

Internet dan teknologi digital telah mengubah pola bisnis di seluruh dunia. Muncul konsep ekonomi platform yang mengutamakan prinsip sharing economy dan kolaboratif. Perusahaan yang menjalankan platform ini menghubungkan dua pihak, yaitu produsen (penyedia barang atau jasa) dan konsumen (pembeli atau pengguna). Awalnya, yang dijual biasanya adalah barang fisik. Namun, dalam ekonomi gig, yang ditawarkan bukan barang, melainkan jasa dari para pekerja. Platform ini berperan sebagai penghubung antara pekerja, perusahaan, dan konsumen, sehingga tercipta hubungan kerja tiga pihak yang saling terhubung. Pada jurnal Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution, Kassi dan Lehdonvirta mengkategorikan enam jenis pekerjaan utama yang umum dalam bisnis model gig online ini, di antaranya jasa profesional, input data dan administrasi, multimedia dan kreatif, sales dan marketing, pengembangan software dan teknologi, serta penulisan dan penerjemah.

Platform ekonomi gig mengambil komisi dari setiap transaksi jasa yang terjadi di dalamnya. Sebagai imbalannya, platform memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pekerjaan atau layanan yang mereka pesan akan terlaksana dengan baik. Dengan adanya peran platform sebagai perantara, konsumen tidak perlu repot mencari penyedia jasa secara langsung, sehingga risiko mendapatkan layanan yang kurang memuaskan bisa dikurangi. Namun, karena jenis dan model platform ekonomi gig sangat beragam, pola hubungan antara platform, penyedia jasa, dan konsumen bisa berbeda-beda tergantung jenis layanan dan struktur platform tersebut. Dalam model bisnis pengantar makanan atau layanan kurir, ada pihak keempat yang terlibat sebagai penyedia produk (merchant) yang diinginkan oleh konsumen. Dalam kasus ini, pekerja gig menyediakan layanan antar dari merchant kepada konsumen. Seringkali platform mengambil komisi dari keduanya, baik penyedia layanan gig maupun merchant sebagai penyedia produk. (Permana et al., 2023)

Berdasarkan laporan World Bank (2021) yang menggunakan data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019, diperkirakan jumlah pekerja yang mengandalkan aktivitas ekonomi gig sebagai pekerjaan utama di Indonesia berkisar antara 430 ribu hingga 2,3 juta orang. Angka ini setara dengan sekitar 0,3 sampai 1,7% dari total angkatan kerja Indonesia yang mencapai 134 juta orang pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola kerja di Indonesia, dimana sebagian pekerja memilih pekerjaan berbasis tugas jangka pendek yang dimediasi oleh platform digital. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan total angkatan kerja, pertumbuhan pekerja gig menunjukkan tren urbanisasi ekonomi digital. Maka penting pengembangan regulasi dan perlindungan sosial untuk mengakomodasi kebutuhan pekerja gig yang rentan terhadap ketidakpastian dan risiko ekonomi, sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi digital sebagai sumber lapangan kerja masa depan.

Pengaruh ekonomi digital terhadap tenaga kerja

Proses digitalisasi telah memberikan pengaruh besar terhadap sektor ketenagakerjaan. Transformasi teknologi telah mendorong pergeseran kebutuhan keterampilan, di mana kemampuan digital, analitis, dan teknis semakin dibutuhkan di pasar kerja. Revolusi industri 4.0 hadir dengan ragam pandangan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu pihak, banyak pihak meyakini bahwa penerapan kecerdasan buatan dalam industri merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. Di pihak lain, kemajuan tersebut juga memunculkan kekhawatiran, terutama terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang berpotensi menyebabkan lonjakan pengangguran di masa mendatang.



Pada era Industri 4.0 memberikan pengaruh besar terhadap struktur ketenagakerjaan, dimana banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kini dapat digantikan oleh teknologi, kecuali untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi. Akibatnya, jumlah pengangguran diperkirakan akan meningkat karena terbatasnya peluang kerja dan semakin ketatnya persyaratan kompetensi. Tanpa revolusi industri ini pun, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menghadapi tantangan pengangguran. Kehadiran Industri 4.0 semakin memperberat tantangan tersebut, terutama dalam hal peningkatan kapasitas tenaga kerja, lonjakan pengangguran, serta kesenjangan sosial.

Dari sisi positif, tenaga kerja dianggap sebagai salah satu aset penting yang berperan besar dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, dilihat dari perspektif lain, bertambahnya jumlah tenaga kerja justru kerap memunculkan masalah ekonomi yang rumit bagi pemerintah untuk diatasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah, yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Akibatnya, sebagian tenaga kerja tidak dapat diserap dengan optimal, sehingga menimbulkan masalah pengangguran. (Afrida et al., 2024)

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi telah memperluas cakupan peluang kerja secara signifikan. Fenomena ini mendorong perubahan dalam dinamika pasar tenaga kerja serta menciptakan jenis-jenis pekerjaan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Beberapa jenis peluang kerja yang telah muncul sebagai dampak langsung dari perkembangan era digital, yaitu:

1. E-commerce

Menurut pendapat (Wong, 2013) yang dikutip Jamaludin dan Sulistianto (2022), e-commerce merupakan mekanisme transaksi jual beli serta pemasaran produk dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti radio, televisi, maupun jaringan komputer, termasuk internet. Keberadaan e-commerce memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi promosi dan mendukung efektivitas kegiatan pemasaran, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penjualan. Bagi konsumen, e-commerce memberikan kemudahan dalam mengakses dan menemukan produk atau layanan yang dibutuhkan.

2. Data analyst

Analis data merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam mengolah dan menganalisis informasi, dengan tujuan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif dalam suatu entitas usaha.

3. Social media specialist

Media Social Specialist merupakan profesi yang berfokus pada pemanfaatan perangkat digital dan teknologi terkini dalam mengelola konten perusahaan melalui berbagai platform media sosial. Individu atau tim yang bertanggung jawab akan mengawasi sebagian atau seluruh isi yang dipublikasikan. Selain bertugas dalam perencanaan dan pembuatan konten, seorang Social Media Specialist juga menjalankan fungsi administratif, yaitu mengelola dan memelihara aktivitas pada akun media sosial yang dikelola.

4. Digital marketing

Menurut Sanjaya dan Tarigan (2019), digital marketing merujuk pada aktivitas pemasaran yang dijalankan melalui berbagai saluran digital. Kegiatan ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen melalui media seperti blog, situs web, email, layanan iklan seperti Google Ads, serta berbagai platform media sosial.

Tantangan dan peluang adanya transformasi digital

Seiring dengan kemudahan akses informasi di era transformasi digital, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, rendahnya keamanan siber dan privasi data menjadi isu krusial. Meningkatnya aktivitas digital berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, serangan malware, serta upaya phishing yang dapat mencuri kredensial akun dan merugikan perusahaan. Selain itu, berbagai bentuk penipuan digital dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Kedua, kesulitan dalam mengubah budaya dan mindset organisasi juga menjadi hambatan signifikan. Resistensi terhadap perubahan terjadi apabila budaya kerja konvensional telah mengakar kuat selama bertahun-tahun. Mindset yang belum terbuka terhadap inovasi dan manfaat teknologi sering kali menjadi penghalang, disertai kekhawatiran bahwa teknologi dapat menggantikan peran manusia atau mengganggu alur kerja yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis dan efektif untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Ketiga, ketidakstabilan pekerjaan menjadi tantangan di era digital. Banyak pekerja yang berstatus kontrak atau freelance mengalami

ketidakpastian dan kurangnya jaminan pekerjaan jangka panjang, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas mereka.

Di sisi lain, transformasi digital juga membuka berbagai peluang yang menjanjikan. Pertama, teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola sejumlah besar data dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk menemukan pola atau tren yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode tradisional, sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih bijak, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan kinerja operasional. Kedua, teknologi digital dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, memungkinkan pekerja menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan berkualitas. Ketiga, fleksibilitas kerja menjadi salah satu keuntungan utama di era digital, dengan kemudahan kerja jarak jauh dan jam kerja yang lebih fleksibel, yang berkontribusi pada peningkatan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan bagi para pekerja. Keempat, kemudahan akses ke pasar global memungkinkan pekerja dan perusahaan untuk melakukan kolaborasi internasional serta memperluas jaringan bisnis secara signifikan. Selain itu, transformasi digital juga menambah peluang kolaborasi dengan lembaga lain, memperkuat sinergi antar organisasi. Terakhir, tersedianya berbagai platform pendidikan dan pelatihan digital memberikan kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil literatur yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme digital dan ekonomi platform telah membawa perubahan struktural terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Transformasi ini ditandai oleh munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang fleksibel dan berbasis digital, peningkatan peran teknologi dalam proses produksi dan distribusi, serta semakin meluasnya praktik kerja berbasis platform. Namun, bersamaan dengan peluang tersebut, terdapat tantangan serius seperti ketidakpastian status kerja, dominasi sektor informal, kesenjangan keterampilan digital, serta minimnya perlindungan hukum bagi pekerja gig dan freelance.

KESIMPULAN

Ekonomi digital atau ekonomi platform bukan hanya soal teknologi dan bisnis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan aturan hukum yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pekerja melalui pelatihan digital, memperkuat regulasi ketenagakerjaan yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta menyediakan perlindungan sosial yang adil agar transformasi digital dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa merugikan tenaga kerja. Selain itu, menjaga keamanan siber dan memberikan edukasi kepada seluruh pekerja menjadi langkah penting untuk mendukung transformasi digital yang aman dan terpercaya. Peran aktif pemimpin sebagai agen perubahan juga sangat dibutuhkan agar adopsi teknologi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat menyeluruh bagi perusahaan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Indonesia dapat memaksimalkan keuntungan dari ekonomi digital sekaligus melindungi kesejahteraan tenaga kerjanya secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.335>
- Afrida, Rafli, A., Naufal, A., Masturi, Rudiansyah, & U, B. (2024). Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, 1(2), 316–325. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i2.65>
- Budiarta, Ginting, & Simarmata. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Firmansyah, L. M., & Poppy Sulistyaning Winanti. (2023). *Kapitalisme di Era Digital: Konglomerasi Perusahaan Ekonomi Platform di Indonesia* [Universitas Gajah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/pelitian/detail/233166#>
- Fuchs. (2016). *Critical theory of communication: New readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the age of the internet*. University of Westminster Press.
- Fuchs. (2017). *Social media: A critical introduction* (2nd ed.). SAGE.



Hanifah. (2024). *Jalan Kapitalisme Modern*. Akuatika Indonesia Raya.

Hidayat, D., & Ulfatun Najicha. (2021). Perlindungan pekerja migran Indonesia/tenaga kerja Indonesia oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

ILO. (2022). *Digital Labour Platforms and the Future of Work in Asia*.

Ishaq, A., & Saksono, E. H. (2023). Kapitalisme Digital dalam Media Sosial Youtube: Kritik Terhadap Perkembangan Teknologi Digital Berdasarkan Pemikiran Herbert Marcuse. *Jurnal Mahardika Adiwidya*, 2(2), 110–123. <https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidi.v2i2.1730>

L.Hadi, Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2020). Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267–298. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>

Maglearning. (2022). *Pengertian Ekonomi Digital Menurut Para Ahli*. <https://maglearning.id/2022/08/16/pengertian-ekonomi-digital-menurut-para-ahli/>

Perdiyanti, & Faeni. (2021). Analisis Pengaruh Work from Home, Digital Platform dan Aplikasi Rapat Online terhadap Produktivitas Kerja pada PT. Telkom Akses di Jakarta Barat. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/sakman.v1i1.396>

Permana, Yorga, M., & Wahyudi, M. (2023). *Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4349942>

Putri, A. Y. E. (2023). *Mengenal Platform, Jenis, dan Model Bisnisnya*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7029784/mengenal-platform-jenis-dan-contoh-model-bisnisnya>

Ricana AjiGantha. (2022). *Perkembangan Ekonomi Digital dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/ricanaaji/63a86f9308a8b507c1287752/perkembangan-ekonomi-digital-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-indonesia>

Rico, & Rosadi, U. (2023). Regulasi Dan Keadilan Sosial: Strategi Perlindungan Pengguna Media Sosial Dalam Konteks Kapitalisme Digital. *Journal Of Social Science Research*, 3(5).

Suhandi, S., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 268–283. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.28>

Telkom. (2024). *Perkembangan Teknologi Digital di Indonesia dan Proyeksi Kedepannya*. Mycarrier.

Temasek, & Bain. (2022). *e-Economy SEA 2022 Report*.

Wijayanto, H., & Ode, S. (2019). DINAMIKA PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1).

World Bank. (2021). *Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia*.